

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang


Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu serta untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan itu semua diperlukan kinerja yang baik dari segala aspek di pemerintahan; fisik maupun non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugas satuan kerja pemerintah tertentu.

Pemerintah memiliki tujuan yang akan dicapai yang dituangkan dalam bentuk target atau sasaran. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target atau sasaran tersebut merupakan kinerja. Kinerja pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. (Nugroho, 2012)

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepada daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan;



Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah

satunya pengukuran kinerja pada belanja daerah karena ini bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182).

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pengguna laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Menilai Kinerja Belanja daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran.

Pada awal tahun 2003, Provinsi Bengkulu bertambah tiga Kabupaten baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun Kabupaten Bengkulu Selatan juga dimekarkan menjadi Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. Kabupaten Mukomuko adalah Kabupaten yang sampai sekarang telah memiliki 15 Kecamatan.

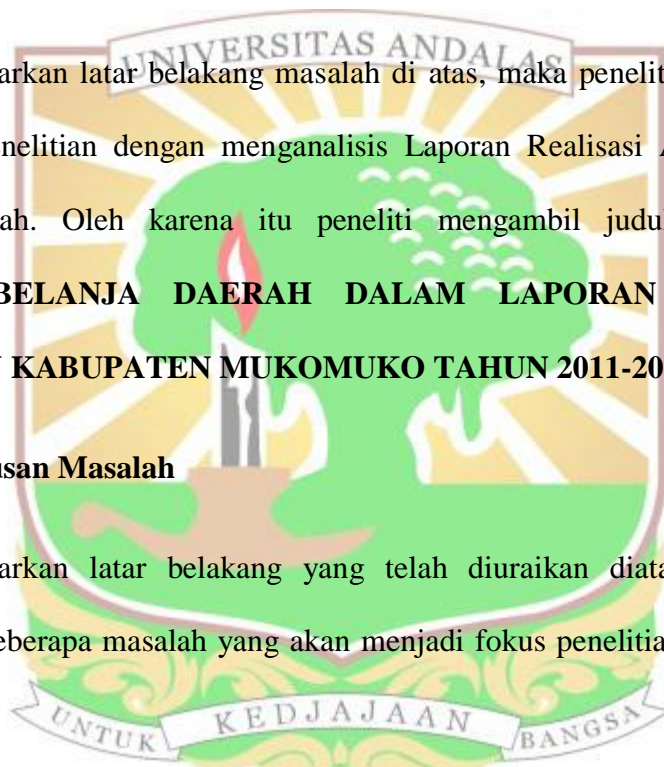
Kabupaten Mukomuko masih dalam tahap berkembang untuk menjadi daerah yang lebih maju. Oleh karena itu diperlukan analisis belanja untuk dilakukan di daerah Kabupaten Mukomuko karena sebagai daerah yang masih dalam tahap berkembang tentunya memiliki nilai anggaran belanja yang terbatas. Dengan nilai anggaran tersebut maka dalam melakukan realisasi belanja perlu dilakukan dengan efisien dan seimbang sehingga dapat melakukan pembangunan daerah dengan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011-2015”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015?
2. Bagaimana Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko tahun 2011-2015

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

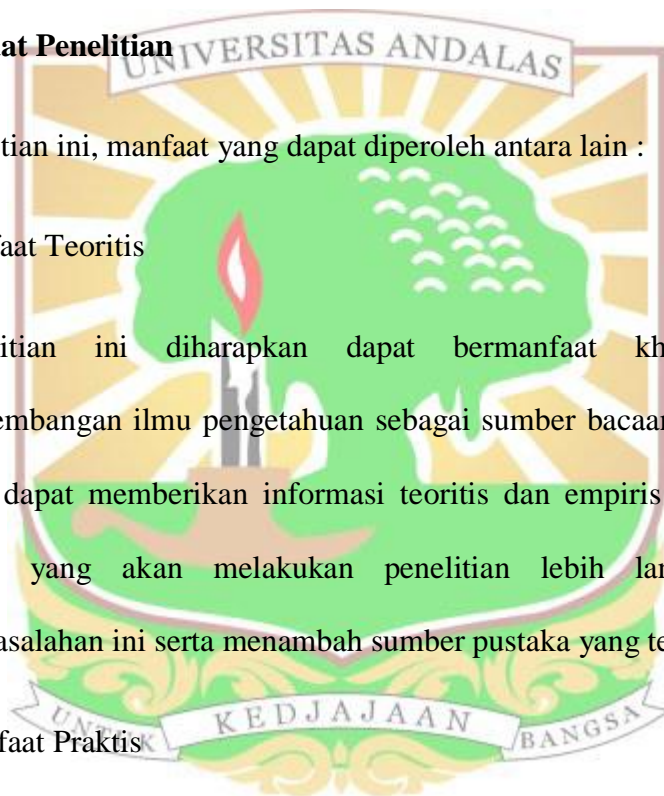
#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan Kinerja Belanja Daerah



b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terbatas pada analisis kinerja keuangan belanja daerah pada Kabupaten Mukomuko berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2011-2015.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep konsep umum yang mendasari penelitian ini yang terdiri atas penjelasan Akuntansi Keuangan Daerah, Konsep Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Belanja Daerah, serta Analisis Kinerja Belanja Daerah yang terdapat dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan data dan studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

